

Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Gender: Partisipasi Wanita TNI dalam Misi Perdamaian Global

Relycia Solihin¹, Anisa Ardhiani², dan Widya Anggoro³

¹Pusdiklat Bela Negara, Badiklat Kemhan, relycia4@gmail.com

²Pusdiklat Bela Negara, Badiklat Kemhan, nisaardh@gmail.com

³Pusdiklat Bela Negara, Badiklat Kemhan, widyaanggororeal@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam misi perdamaian menjadi isu strategis sejak keluarnya Resolusi DK PBB 1325 tentang *Women, Peace and Security* (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan). Indonesia masih menghadapi keterbatasan representasi perempuan TNI, yang berkisar 5–10%, jauh di bawah target PBB sebesar 15% pada tahun 2028. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik di lapangan, di mana peran wanita TNI cenderung non-strategis dan simbolis. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi wanita TNI dalam misi UNAMID serta mengevaluasi strategi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Markas Besar TNI, dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Identifikasi pada faktor penghambat dan pendukung serta relevansinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia dan agenda SDGs. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen, dengan triangulasi sumber untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan, kontribusi secara signifikan wanita TNI dalam pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, dan *community engagement*. Kesimpulannya, partisipasi wanita TNI bukan hanya soal kuota, melainkan faktor strategis dalam efektivitas operasi perdamaian dan diplomasi pertahanan Indonesia. Secara akademik penelitian ini berimplikasi pada pengayaan kajian hubungan internasional dan studi pertahanan dengan memasukkan perspektif gender sebagai dimensi penting dalam keamanan global. Maka diperlukan upaya konsisten untuk menginternalisasikan nilai kesetaraan gender dalam budaya organisasi militer melalui program pendidikan, sosialisasi publik, dan advokasi kebijakan, serta memperluas diplomasi perdamaian berbasis gender di forum internasional guna memperkuat legitimasi global.

Kata Kunci: Pemanfaatan dan pengembangan SDM, Gender, Partisipasi Wanita TNI, Misi Perdamaian.

ABSTRACT

Since the adoption of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security, women's participation in peacekeeping missions has become a strategic issue. In Indonesia, female military personnel represent only 5% to 10% of the force, which is far below the UN target of 15% by 2028. This gap reflects the difference between policy commitments and practical realities, as women's roles often remain symbolic rather than strategic. This study analyzes the participation of female personnel of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the UNAMID mission and examines the strategies of the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, TNI Headquarters, and the TNI Peacekeeping Mission Center. It identifies supporting and limiting factors and evaluates their relevance to Indonesia's defense diplomacy and the Sustainable Development Goals (SDGs). Using qualitative methods, the study involves interviews and document analysis, with triangulation to ensure validity. Findings show that female TNI personnel contribute significantly in health services, psychosocial support, and community engagement. Their participation goes beyond quotas and represents a strategic factor in the effectiveness of peace operations and Indonesia's defense diplomacy. Academically, this research enriches the study of international relations and defense by incorporating gender perspectives as a critical dimension of global security. It highlights the need to internalize gender equality values within military culture through education, public awareness, and policy advocacy, while expanding gender-based peace diplomacy in international forums to enhance global legitimacy.

Keywords: Human Resources Utilization and Development, Gender, Participation of Indonesian Women Military Personnel (TNI), Peacekeeping Mission.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender masuk dalam beberapa kajian akademik dalam konteks keamanan internasional dengan semakin mendapatkan perhatian serius sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 tentang WPS pada tahun 2000. Dari beberapa studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian mampu meningkatkan efektivitas operasi, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat lokal, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan menurunkan kasus kekerasan berbasis gender di daerah konflik (Olsson & Gizelis, 2015; Karim & Beardsley, 2017). Penelitian tersebut menekankan bahwa perempuan penjaga perdamaian memiliki keunggulan dalam fungsi non-tempur seperti mediasi sosial, komunikasi komunitas, serta pemberdayaan perempuan lokal (Bertolazzi, 2010).

Indonesia sebagai negara berkembang dan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian atau *Troop Contributing Country* (TCC) yang berkomitmen terhadap WPS, belum banyak diulas secara spesifik karena masih berfokus pada konteks global. Kajian terdahulu yang membahas kontribusi Indonesia secara umum dalam misi PBB (Sukma, 2012) belum banyak menekankan pada dimensi gender, baik dari segi peran maupun strategi kebijakan nasional yang menyangga partisipasi perempuan dalam operasi perdamaian.

Dalam misi *United Nations African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) di bagian barat Sudan, wanita TNI berperan penting dalam sektor pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, *community engagement*, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat sipil (Hadiwinata, 2017; Kementerian Luar Negeri RI, 2021). Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas misi, tetapi juga memperkuat diplomasi Indonesia di kancah global (Wulan, 2020). Namun belum menganalisis secara sistematis bagaimana kebijakan nasional dan institusional, dengan melibatkan Kemhan, Kemenlu, Mabes TNI dan PMPP TNI, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan posisi strategis wanita TNI.

Selain itu adanya kesenjangan konseptual antara komitmen normatif (*das sollen*) Indonesia

terhadap WPS Agenda dan realitas empiris (*das sein*) di lapangan. Secara normatif, Indonesia mendukung kesetaraan gender melalui kebijakan pertahanan dan diplomasi yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG 5). Namun, secara empiris, keterlibatan perempuan TNI masih cenderung simbolis dan terpusat pada peran non-strategis, dengan hambatan struktural pada sistem karier, stereotip gender, serta terbatasnya akses terhadap posisi kepemimpinan (Sundaryani, 2019; PMPP TNI, 2023).

Dalam konteks kebijakan nasional, terdapat empat aktor utama yang memegang peranan penting. Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perumus kebijakan strategis terkait pembangunan pertahanan berbasis kesetaraan gender. Kedua, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengawal diplomasi dan advokasi peran perempuan Indonesia dalam forum internasional. Ketiga, Markas Besar TNI (Mabes TNI) sebagai lembaga yang menyiapkan pola karier, pendidikan, dan pembinaan organisasi yang mendukung partisipasi perempuan. Keempat, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang berperan menyiapkan pendidikan, pelatihan, dan kesiapan operasional kontingen, termasuk personel wanita (Subagyo, 2020).

Dari sisi akademik (*state of the art*), sejumlah penelitian telah mengulas kontribusi perempuan dalam operasi perdamaian, terutama efektivitasnya dalam membangun kepercayaan masyarakat lokal serta memberikan perlindungan lebih baik bagi kelompok rentan (Olsson & Gizelis, 2015). Namun, kajian yang secara khusus menyoroti peran wanita TNI dalam misi UNAMID dan strategi nasional yang mendukungnya masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kontribusi Indonesia secara umum sebagai penyumbang pasukan perdamaian (Sukma, 2012), tanpa menekankan aspek gender dan kebijakan domestik yang memayungi peran perempuan TNI.

Dalam konteks Indonesia, meskipun tren partisipasi personel perempuan TNI dalam misi perdamaian terus meningkat dalam satu dekade terakhir, proporsinya masih relatif rendah dibandingkan dengan total kontingen yang dikirim (PMPP TNI, 2023). Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kesempatan untuk menempati posisi strategis di lapangan,

hambatan struktural dalam sistem karier militer, serta masih kuatnya stereotip gender yang mempengaruhi proses seleksi dan promosi (Hadiwinata, 2017; Wulan, 2020). Oleh karena itu, kebijakan afirmatif dan program pelatihan berbasis gender menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar representasi simbolis.

Sehingga terdapat tiga celah utama (*research gaps*) yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu: 1) Belum adanya kajian empiris mengenai peran perempuan TNI dalam misi UNAMID, khusus dalam hal kontribusinya terhadap efektivitas misi serta relasi sipil dan militer di lapangan; 2) Belum adanya kebijakan lintas lembaga nasional yaitu Kemhan, Kemenlu, Mabes TNI dan PMPP TNI yang dapat menjelaskan koordinasi strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam operasi perdamaian; dan 3) Masih kurangnya pendekatan yang komprehensif dalam mengintegrasikan aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang tidak hanya mengukur jumlah partisipasi tetapi juga makna dan kualitas keterlibatan perempuan dalam posisi strategis serta pengambilan keputusan.

Maka penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis komprehensif mengenai sinergi antara peran wanita TNI di UNAMID serta strategi Kemhan, Kemenlu, Mabes TNI, dan PMPP TNI dalam meningkatkan partisipasi mereka di masa depan. Dengan melakukan penilaian sejauh mana adanya komitmen terhadap agenda WPS yang diterjemahkan ke dalam praktik operasional dan diplomasi pertahanan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap studi hubungan internasional dan pertahanan berbasis gender, serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan yang mendorong partisipasi bermakna (*meanful*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data wawancara mendalam dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subyektif dari para aktor yang terlibat secara langsung dalam kebijakan dan pelaksanaan misi perdamaian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu pertama wawancara mendalam (*in depth interview*) dan analisis dokumen; serta kedua dengan informan dan kriteria pemilihan, yaitu informan ditentukan dengan teknik *purposisve sampling*, berupa pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Wawancara dilakukan dengan menunjuk informan dari PMPP TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, wanita TNI purna tugas UNAMID serta akademisi perdamaian dan resolusi konflik.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan tematik dengan mengikuti model Miles dan Huberman (2014), terdiri dari tiga tahap yaitu, 1) reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data hasil wawancara serta dokumen untuk menemukan tema; 2) *display data*, yakni penyajian data dalam bentuk matriks tematik, tabel atau peta konsep untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variable dan kategori; 3) penarikan Kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti melakukan interpretasi berdasarkan teori dan konsep yang diadopsi. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan Teknik *coding* bertahap yaitu : 1) *open coding*, dengan mengidentifikasi konsep awal dari narasi informan; 2) *axial coding*, dengan menghubungkan kategori dan subkategori berdasarkan kesamaan tema; 3) *selective coding*, dengan merumuskan kesimpulan teoritis yang menjelaskan hubungan antara peran Perempuan TNI dan kebijakan nasional.

Untuk menjaga validitas dan reabilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978; Creswell, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber informan untuk memastikan data. Sedangkan triangulasi metode, dilakukan dengan mengkombinasikan hasil wawancara dengan temuan dari dokumen resmi dan literatur akademik. Dengan kombinasi strategi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam, valid, dan reflektif mengenai dinamika partisipasi wanita TNI dalam misi perdamaian internasional serta kontribusi kebijakan nasional dalam memperkuat peran mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan sumber daya manusia

berbasis gender yang disorot dalam penelitian ini adalah partisipasi wanita TNI dalam misi perdamaian pada konflik Darfur. Partisipasi ini dilakukan dalam naungan UNAMID sehingga Wanita TNI terlibat dalam kegiatan yang memiliki dampak langsung pada masyarakat Darfur. Observasi lapangan menunjukkan bahwa partisipasi wanita TNI dalam berbagai kegiatan ini muncul karena wanita TNI membawa keahlian khusus sebagai *female peacekeepers* yang memberikan dampak positif pada pelaksanaan misi perdamaian. Oleh karena itu, partisipasi mereka bukan semata-mata karena tugas yang diberikan, melainkan sebagai ekspresi nilai dan kemampuan *female peacekeepers* yang dapat diberdayakan untuk mendukung pencapaian mandat UNAMID (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Sinaga, 2023; Tansya, 2023). Hal ini sejalan dengan teori Partisipasi menurut Wazir, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama (Mardikanto & Soebianto, 2013).

Lebih dalam, teori Partisipasi menurut Cohen & Uphoff (1980), turut diadopsi dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi dibagi ke dalam beberapa kategori. Wanita TNI terlibat secara eksklusif dalam partisipasi implementasi, kebermanfaatan, dan evaluasi. Partisipasi implementasi merujuk pada kontribusi yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Jenis partisipasi ini dapat berupa kontribusi tenaga yang diberikan oleh individu yang berkomitmen untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Pada konteks ini, keterlibatan wanita TNI melibatkan implementasi program CIMIC, pelaksanaan kegiatan evaluasi, dan partisipasi dalam patroli yang telah direncanakan dan menjadi bagian dari rutinitas. Keikutsertaan wanita TNI dalam partisipasi implementasi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka memiliki keahlian khusus yang terkait dengan konsep gender dalam konteks keamanan dan sebagai *female peacekeepers* (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Sinaga, 2023; Tansya, 2023).

Selanjutnya, partisipasi kebermanfaatan. Pada jenis partisipasi ini, wanita TNI memperoleh manfaat materi, sosial dan pribadi. Manfaat

materi datang dari gaji pokok, uang saku dan insentif tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para wanita TNI. Kemudian, manfaat sosial berupa rasa kepercayaan diri, pengakuan dari instansi serta instansi internasional serta peran sosial dalam merepresentasikan wanita Muslim yang kuat dalam melaksanakan tugas diplomasi pertahanan (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Tansya, 2023).

Selain itu, manfaat pribadi diperoleh dari kesempatan lebih besar dalam melegitimasi Indonesia dalam isu perdamaian dunia dan kesetaraan gender yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia. Tentunya terdapat kebanggaan, kepuasan serta motivasi untuk kembali berkontribusi dalam tugas internasional untuk meningkatkan profesionalisme, pengakuan sosial, kontribusi diplomatik dan penguatan makna bela negara di level internasional (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Tansya, 2023).

Terakhir, jenis partisipasi evaluasi, yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyampaikan keluhan dan saran terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terkadang, keluhan dan saran yang diberikan mungkin terkesan kurang halus karena mencerminkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pencapaian kegiatan tersebut. Pada partisipasi ini, wanita TNI menyampaikan segala bentuk saran dan pesan kepada Dansatgas. Berdasarkan hasil temuan, wanita TNI mengeluhkan perihal keterbatasan linguistik mereka ketika dihadapkan pada masyarakat Darfur yang berkomunikasi dengan bahasa Arab dialek Sudan, minimnya wanita TNI di kontingen sehingga merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat Darfur ketika program CIMIC padahal terdapat beberapa posisi atau jabatan yang dirasa lebih efektif jika diisi oleh wanita seperti posisi keuangan dan perawat kesehatan, di sisi lain juga akan meningkatkan partisipasi wanita TNI seperti target yang ditetapkan oleh PBB serta memperkuat peran wanita TNI (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Tansya, 2023).

Sejalan dengan konsep selanjutnya yaitu Konsep Gender Dalam Keamanan. J. Ann Tickner, seorang ahli feminisme melihat bahwa hubungan internasional feminisme telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan teori

feminis kedalam studi keamanan (Soetjipto & Trimayuni, 2013), yang bertujuan memperluas pandangan terhadap peran yang akan memberikan dampak positif, khususnya wanita dan anak-anak. Tetapi walaupun perwujudan idelisme feminis akan terwujud dalam praktik sosial namun secara kelembagaan untuk partisipasi Wanita belum mencapai pada level pengambil keputusan strategis.

Dalam konteks penelitian ini, perwujudan adanya gender dalam keamanan adalah dengan pelibatan wanita TNI dalam misi perdamaian. Pelibatan ini dilakukan atas dasar Resolusi 1325 DK PBB yang menyatakan bahwa *female peacekeepers* memiliki peran penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah konflik atau pasca-konflik. Berdasarkan penelitian karya Firomatillah & Sudirman (2019), peran penting *female peacekeepers* dapat memudahkan pelaksanaan mandat misi perdamaian karena *female peacekeepers* memiliki beberapa keahlian khusus, yaitu: (1) Memberikan kenyamanan kepada wanita dan anak-anak, (2) Mudah mengakses wanita dan anak-anak, (3) Memfasilitas interaksi dengan wanita lain dalam sebuah budaya yang melarang interaksi lintas gender, (4) Menjadi simbol pembedayaan bagi wanita dan anak-anak dalam wilayah konflik, (5) Membantu mengurangi konflik, (6) Memberikan perasaan aman dan kenormalan bagi wanita dan anak-anak dan (7) Menyediakan garis haluan dan materi pelatihan tentang perlindungan hak dan kebutuhan khusus wanita.

Keahlian khusus ini pun terealisasi ketika melaksanakan program CIMIC, peresmian proyek QIPs dan patroli yang dilakukan wanita TNI dalam kontingen. Berdasarkan hasil temuan ketika wawancara berlangsung, wanita TNI berhasil merealisasikan seluruh keahlian ini sehingga masyarakat khususnya wanita dan anak-anak Darfur sangat menerima kehadiran wanita TNI dengan hangat. Wanita TNI juga memberikan kesan baik kepada mereka hingga kehadiran wanita TNI dianggap sebagai keluarga, *role model* dan motivasi untuk bangkit dari kesusahan yang sedang melanda (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Tansya, 2023).

Selanjutnya, partisipasi wanita TNI juga dilihat dari kacamata Konsep *Female Peacekeepers*. Menurut Syamsunasir et al., (2022), *female peacekeepers* dapat berperan

dalam: (1) menyelesaikan konflik di daerah konflik dan (2) memfasilitasi proses *trauma healing* bagi korban konflik. Hasil penelitian di lapangan, wanita TNI tidak terlibat langsung dalam konflik besar di Darfur sehingga wanita TNI tidak turut menyelesaikan konflik Darfur seperti yang dipahami oleh konsep *Female Peacekeepers*. Akan tetapi, pada keahlian yang kedua yaitu dapat memfasilitasi proses *trauma healing* bagi korban konflik, wanita TNI berperan melalui program CIMIC yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Pendekatan yang diterapkan pun mengedepankan pendekatan persuasif seperti mengajak masyarakat Darfur untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti bermain, menari, dan mendengarkan cerita kesedihan mereka, serta berbagai bentuk kegiatan suka cita lainnya (Evi, 2023; Irmawati, 2023; Netty, 2023; Tansya, 2023). Upaya ini bertujuan memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan kesempatan bagi masyarakat Darfur untuk sementara waktu melupakan beban kesedihan mereka.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi ditentukan oleh enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi dan politik, serta sikap para pelaksana. Dalam konteks Indonesia, standar kebijakan sudah jelas mengacu pada Resolusi DK PBB 1325 tentang WPS dan Resolusi 2538 (2020) tentang *Women in Peacekeeping Operations*. Dalam forum internasional, Indonesia mengejar diplomasi perdamaian dengan fokus pada peningkatan peran wanita dalam proses perdamaian.

Jika dilihat dalam konteks Indonesia, standar kebijakan sudah jelas mengacu pada Resolusi DK PBB 1325 tentang WPS dan Resolusi 2538 (2020) tentang *Women in Peacekeeping Operations*. Indonesia menegaskan komitmennya melalui partisipasi aktif dalam forum multilateral termasuk Komite Khusus Misi Pemeliharaan Perdamaian (C-34), Sidang Komite IV Majelis Umum PBB, *Contingent-Owned Working Group*, dan partisipasi dalam *pledging* dalam *UN Peacekeeping Ministerial* (Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, 2023). Dalam keterlibatan aktifnya di forum-forum tersebut, Indonesia secara konsisten mengejar diplomasi perdamaian dengan fokus pada peningkatan peran wanita dalam proses

perdamaian. Indonesia meyakini bahwa kontribusi signifikan wanita dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan tercermin dalam sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemerintah Indonesia pun secara berkesinambungan menekankan peningkatan dan kontribusi *female peacekeepers*, menganggap mereka sebagai aset penting dalam konteks politik luar negeri dan diplomasi nasional. Sebagai langkah konkret, Indonesia menjadi *co-sponsor* dalam pertemuan “*Upholding Women’s Rights in Afghanistan: An Urgent Moment for UNAMA Renewal*” yang diselenggarakan oleh *Group of Friends Women in Afghanistan* pada Maret 2022. Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan *UN Women* dan *Georgetown Institute for Women, Peace, and Security*. Keanggotaan sebagai *co-sponsor* ini menandakan komitmen Indonesia terhadap advokasi hak-hak wanita, khususnya dalam konteks pembaharuan UNAMA, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendukung isu-isu gender di tingkat internasional (Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, 2023).

Di tingkat regional, Indonesia menjalin kemitraan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik melalui acara “*We Talkshow the Series: Contributing to Peacekeeping: A Pacific Perspective*.” Pada platform ini, peran strategis *female peacekeepers* dalam meningkatkan efektivitas mandat misi perdamaian PBB ditekankan. Pada pertemuan C-34 tahun 2023, Indonesia memegang peran sebagai negosiator utama GNB dalam menghadapi isu WPS (Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, 2023).

Keterlibatan Indonesia di ASEAN ditingkatkan dengan PMPP TNI yang memimpin APCN dari tahun 2023 hingga 2024. Dalam kapasitas ini, PMPP TNI menyelenggarakan *Gender Vocal Point Workshop* pada 11-13 Oktober 2023, yang memfokuskan diskusi pada WPS, *Gender Strategy*, dan *Lesson Learned*. Agenda ini dihadiri Jenderal OMA yang akan memberikan *briefing* dan paparan, serta mengundang pemerintah Jepang sebagai *Director for Defense Cooperation* di Indo-Pasifik dan *Director for International Cooperation on Women, Peace, and Security in the Japanese Ministry of Defence*, yaitu Ms. Tomoko (Subagyo, 2023).

Pada tahun 2019, Indonesia memimpin

inisiatif pembentukan SEANWPNM untuk mendorong agenda WPS di Asia Tenggara. Selanjutnya, pada 14 Juni 2021, Indonesia menjadi tuan rumah *Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators* yang menghadirkan wanita dengan kompetensi dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik serta berkontribusi pada upaya membangun perdamaian (Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, 2023). Pengembangan ini pun menunjukkan adanya *policy standard and objectives* yang kuat di level internasional.

Pada aspek sumber daya, Kemhan memberikan peluang pendidikan kepada wanita di Akademi TNI sesuai dengan regulasi Panglima TNI, yang memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengikuti pendidikan bersama pria sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Telegram Kasad No. ST/172/I/2003 tanggal 30 Januari 2013 tentang Petunjuk Penerimaan Calon Taruna/Taruni Akmil TA. 2013 (Mabes TNI, 2013). Hal ini membuka peluang bagi wanita TNI untuk mengejar karir. Peningkatan kapabilitas wanita TNI dilakukan pula melalui pelatihan khusus, seperti WPT, yang dirancang untuk memperdalam pengetahuan terkait *Green Material* dan *Blue Material* (Sinaga, 2023).

Dari segi komunikasi dan koordinasi antar organisasi, terdapat sinergi antara Kemhan, Kemenlu, Mabes TNI, dan PMPP TNI, baik dalam lingkup global maupun nasional (Napitupulu, 2023). Tantangan utamanya pada kondisi sosial-budaya, yaitu masih adanya stigma gender di masyarakat Indonesia. Menurut Van Meter & Van Horn, kondisi eksternal seperti faktor budaya dapat memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini tercermin pada paradigma tradisional yang memandang perempuan sebagai pihak sekunder dalam ranah militer, sehingga perlu strategi komunikasi publik yang berkesinambungan dan sosialisasi kesetaraan gender. Hal ini menjadi prinsip yang diakui oleh Kemhan, dengan upaya proaktif dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung partisipasi wanita dalam misi perdamaian.

Selain faktor kebijakan, upaya meningkatkan partisipasi wanita TNI juga berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan. Naila Kabeer (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan melibatkan tiga dimensi: *resources* (sumber daya), *agency*

(kapabilitas/agensi untuk mengambil keputusan), dan *achievements* (hasil atau pencapaian). *Resources* tercermin dari dukungan diplomasi Indonesia baik dalam forum multilateral dan regional, serta keberhasilan mendorong Resolusi 2538 DK PBB (2020) pada bulan Agustus 2020 yang membahas *Women in Peacekeeping Operations* (Direktorat Kerja sama Multilateral). Keberhasilan resolusi ini mencatat tonggak sejarah sebagai resolusi pertama dalam sejarah DK PBB yang secara eksplisit membahas peran *women in peacekeeping operations*.

Agency diwujudkan melalui pembukaan akses pendidikan militer, pelatihan internasional hingga kebijakan prioritas pengiriman personel wanita yang belum berkeluarga. Tujuannya untuk memastikan bahwa wanita TNI dapat fokus sepenuhnya pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa adanya beban moral yang ditinggalkan di Indonesia (Subagyo, 2023). Sehingga upaya ini memberikan ruang bagi wanita TNI untuk mengembangkan agensi personal dan profesionalnya tanpa hambatan struktural yang berlebihan. *Achievements* dapat dilihat dari kontribusi nyata wanita TNI di misi UNAMID. Kehadiran mereka bukan sekadar pemenuhan kuota, tetapi juga meningkatkan efektivitas misi, terutama dalam hal membangun kepercayaan masyarakat sipil, memberikan pelayanan kesehatan, serta memediasi konflik di tingkat komunitas.

Meskipun terdapat kemajuan secara signifikan dalam kebijakan dan pelibatan wanita TNI di dalam misi perdamaian, tetapi muncul beberapa gap yaitu; 1) Struktural, jumlah dan jabatan untuk wanita TNI dalam misi perdamaian masih terbatas, sehingga belum ada mekanisme afirmasi untuk penempatan posisi strategis; 2) Kultural, norma patriarkal yang masih membatasi persepsi tentang adanya peran perempuan di ranah militer; 3) Fungsional, kegiatan evaluasi dan umpan balik dari lapangan misi perdamaian belum secara efektif diintegrasikan ke dalam kebijakan pelatihan dan rekrutmen; dan 4) Institusional, belum adanya standar gender *mainstreaming* yang mengikat dalam setiap tahapan misi perdamaian.

KESIMPULAN

Partisipasi wanita TNI dalam misi perdamaian UNAMID menunjukkan bahwa

pemanfaatan sumber daya manusia berbasis gender mampu memperkuat efektivitas operasi perdamaian. Kehadiran *female peacekeepers* terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya wanita dan anak-anak, melalui peran mereka dalam program CIMIC, patroli, pelayanan kesehatan, dan trauma *healing*. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi wanita TNI tidak sekadar pelengkap, tetapi merupakan kontribusi strategis dan substantif yang sejalan dengan mandat Resolusi DK PBB 1325 dan Resolusi 2538 tentang *Women in Peacekeeping Operations*.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori gender dalam hubungan internasional dan kebijakan pertahanan. Pertama, temuan penelitian ini memperkuat paradigma *feminist international relations theory* dengan bukti empiris bahwa kehadiran perempuan dalam operasi perdamaian bukan hanya aspek representasi, tetapi juga faktor determinan bagi efektivitas diplomasi keamanan dan legitimasi misi perdamaian. Dengan demikian, artikel ini menempatkan gender bukan sekadar variabel sosial, melainkan aktor strategis dalam sistem keamanan internasional.

Kedua, penelitian ini memperluas penerapan teori partisipasi (Cohen & Uphoff) dalam konteks militer, menunjukkan bahwa pelibatan perempuan meningkatkan kualitas interaksi sipil-militer dan kepercayaan masyarakat lokal, yang menjadi elemen penting keberhasilan operasi perdamaian. Ketiga, melalui kerangka teori implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn), artikel ini menambahkan dimensi gender sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan pertahanan dan diplomasi perdamaian Indonesia. Keempat, dengan mengintegrasikan konsep pemberdayaan perempuan (Naila Kabeer) ke dalam konteks militer, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pertahanan dapat menjadi arena pemberdayaan yang efektif, sekaligus memperluas batas-batas teori gender dari ranah sipil ke ranah militer dan strategis.

Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori hubungan internasional yang lebih inklusif dan multidimensional, serta memperkaya kajian kebijakan pertahanan dengan menempatkan gender sebagai elemen analisis dalam perumusan strategi keamanan nasional dan

diplomasi militer. Dari sisi praktis dan kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan peran wanita TNI melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman operasional internasional yang berperspektif gender. Peningkatan keterampilan bahasa asing, diplomasi pertahanan, komunikasi lintas budaya, dan penguasaan materi misi harus menjadi prioritas agar *female peacekeepers* lebih efektif menjalankan mandat perdamaian.

Lebih jauh TNI dan Kemhan perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk peningkatan partisipasi perempuan meliputi : 1) penyusunan rencana aksi nasional gender di bidang pertahanan, sebagai panduan strategis implementasi Resolusi DK PBB 1325 dalam kerangka kebijakan pertahanan Indonesia; 2) perlunya mendirikan pusat pelatihan khusus bagi wanita untuk operasi perdamaian di bawah koordinasi PMPP TNI, untuk memperkuat kompetensi taktis dan diplomatik *female peacekeepers*; 3) kebijakan afirmatif dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan militer bagi personel perempuan, agar terjadi keberagaman gender terwakili pada level strategis dan pengambilan keputusan; 4) penguatan diplomasi pertahanan berbasis gender melalui kolaborasi Kemhan, Kemenlu dan Mabes TNU di forum internasional untuk mempromosikan Indonesia sebagai pelopor negara kontribusi pasukan perdamaian yang berperspektif gender; dan 5) integrasi Pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum akademi militer dan Lembaga Pendidikan pertahanan guna membentuk budaya organisasi yang inklusif dan adaptif terhadap isu gender.

Sebagai saran, diperlukan upaya konsisten untuk menginternalisasikan nilai kesetaraan gender dalam budaya organisasi militer melalui program pendidikan, sosialisasi publik, serta advokasi kebijakan. Selain itu, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi perdamaian berbasis gender sebagai bagian dari *soft power* nasional. Dengan demikian, partisipasi wanita TNI tidak hanya mencerminkan pemberdayaan Perempuan dalam bidang pertahanan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan keamanan global serta kontribusinya terhadap perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banwell, S. (2020). *Gender and Violence(s) of War and Armed Conflict: More Dangerous to Be Woman?* 1st ed. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Cockett, R. (2010). *Sudan : Darfur and The Failure of an African State*. London: Yale University Press.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Peacekeeping and Indonesia's Foreign Policy: The Role of the Military and Women Peacekeepers*. Jakarta: CSIS.
- Hagan, J., dan Richmond, W. (2009). *Darfur and the Crime of Genocide*. New York: Cambridge University Press.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Modul Bela Negara*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI (2017). *Pedoman Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Kemhan RI.
- Lahdili, N. (2016). "Darfur Conflict: The Role of International Intervention in the Conflict Resolution." In *5th International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region*. Turkey: Sakarya University.
- Lemhannas RI. (2019). *Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas.
- Mardikanto, T., dan Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.
- Olsson, L., & Gizelis, T. (2015). *Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325*. London: Routledge.
- Soetjipto, Ani, dan Trimayuni, P. (2013). *Gender & Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sukma, R. (2012). *Indonesia and International Peacekeeping: History, Issues, and Prospects*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

- Suliman, O. S. (2011). *The Darfur Conflict: Geography or Institutions?* New York: Routledge.
- Syamsunasir et al. (2022). *Keamanan Nasional*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UNDP. (2019). *Sustainable Development Goals Report 2019*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations. (2000). *United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security*. New York: United Nations.
- UN Women. (2021). *Women in Peacekeeping: The Power to Build Peace*. New York: United Nations.
- Cohen, John. M. dan Uphoff, N. T. (1980). "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity." *World Development* 8(3).
- Deldiya. (2017). "Motivasi PBB Membentuk United Nation Mission In Darfur (UNAMID) Sebagai Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007." *JOM FISIP* 4(2).
- Firohmatillah, Z. P., dan Arfin, S. (2019). "Peran Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di Lebanon." *Indonesian Perspective* 4(2).
- Subagyo, A. (2020). "Strategi Indonesia dalam Peningkatan Partisipasi Pasukan Perdamaian Dunia: Perspektif Gender." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2).
- Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata. (2023). "Wawancara Direktorat Keamanan Internasional Dan Pelucutan Senjata."
- Direktorat Kerja sama Multilateral. (2023). "Wawancara Direktorat Kerja sama Multilateral."
- Evi. (2023). "Wawancara Serka (K) Evi."
- Irmawati. (2023). "Wawancara Letda CKM (K) Irmawati."
- Napitupulu, Marihot. (2023). "Wawancara Kolonel (KH) Marihot Napitupulu."
- Netty. (2023). "Wawancara Peltu (K) Netty."
- Ops PMPP TNI. (2023). *Rekap Data Personel TNI UNAMID 2015-2018*. Bogor.
- UNAMID. (2017). "UNAMID Force Officials Bi-Annual Magazine." *United Nations*, December.
- UN Peacekeeping. (2024). *Troop and Police Contributors*. Diakses pada 27 September 2025 [<https://peacekeeping.un.org>].